



SAMBUTAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI DHARMA KARYADHIKA TAHUN 2014
Jakarta, 30 Oktober 2014

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Hadirin dan undangan yang berbahagia,

Marilah terlebih dahulu kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang oleh karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan hari Dharma Karyadhika Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2014 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh tamu dan undangan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Saya atas nama pribadi juga ingin mengucapkan terima kasih atas karya dan prestasi yang telah diukir Bapak Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014, selama beliau memimpin dan menahkodai kapal besar ini yaitu Kementerian Hukum dan HAM tercinta.

Suatu tantangan dan kebanggaan tersendiri setelah diberikan amanah oleh Bapak Presiden RI bagi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM dalam Kabinet Kerja, untuk berjuang bersama Bapak/Ibu jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan

saya tidak pernah membayangkan sebelumnya manakala saya datang di Kementerian ini pada saat Kementerian Hukum dan HAM memasuki usia yang ke-69 tahun. Suatu usia yang sangat matang dan sarat akan pengalaman.

Saya telah melihat, mendengar, merasakan kemajuan dan perkembangan kinerja yang patut kita apresiasi bersama di Kementerian ini. Merupakan tantangan yang besar bagi saya untuk terus mendorong kemajuan prestasinya, namun saya tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya dukungan dari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang kita banggakan. Sesuai tema yang telah ditetapkan yaitu dengan Semangat Hari Dharma Karyadhika Tahun 2014 Kita Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan, Professional dan Bebas Dari Korupsi.

Hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen tersebut diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, mewujudkan negara Indonesia yang kuat, kokoh, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Namun demikian, upaya untuk memberantas korupsi dalam kerangka reformasi birokrasi masih merupakan jalan panjang dan terjal mengingat fakta korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Potret buram pelayanan publik menunjukkan fakta bahwa pelayanan publik belum bebas dari korupsi, pungutan liar, dan suap. Adanya Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dapat dikatakan belum optimal seperti yang diharapkan. Birokrasi Indonesia seharusnya menjadi lokomotif utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kita ketahui bersama adanya fakta bahwa perbuatan korupsi telah menjadi persoalan besar yang dapat merusak citra birokrasi Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Berbagai ekspose data melalui media sangat mudah diketahui dan diakses seluruh masyarakat menunjukkan bahwa reformasi

birokrasi yang telah dimulai sejak 2010 perlu didorong agar dampaknya dapat lebih dirasakan secara langsung terhadap kinerja pelayanan publik di Indonesia.

Menjadi suatu “pekerjaan rumah” yang harus segera diselesaikan, meski berbagai tantangan yang harus dihadapi, saya minta kepada seluruh jajaran kementerian Hukum dan HAM untuk semakin merapatkan barisan dan bersinergi untuk menghasilkan kinerja terbaik dengan prestasi. Kita tingkatkan dedikasi, loyalitas dan semangat pengabdian kita sebagai aparatur negara.

Hadirin yang saya cintai dan banggakan,

Peringatan hari jadi suatu institusi sejatinya merupakan momen yang penting untuk menunjukkan eksistensinya melalui capaian kinerja yang dapat dirasakan oleh lingkungannya dengan perbaikan-perbaikan nyata dalam merealisasikan tujuan yang hendak dicapai organisasi. Dalam waktu yang singkat ini, kita harus menentukan skala prioritas terhadap hal-hal yang memerlukan perbaikan secara cepat. Pada tataran pelaksanaan operasional organisasi dapat diketahui bahwa baik buruknya suatu pelayanan publik sangat tergantung pada daya dukung perangkat *hardware*, *software* dan SDM yang memiliki kapasitas dan berdaya saing tentunya.

Seiring dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dilingkungan kementerian Hukum dan HAM yang kita cintai ini, tidak berlebihan kiranya kita diharapkan dapat segera melakukan langkah-langkah nyata dalam waktu yang relatif singkat, mengupayakan :

- (i) Organisasi birokrasi yang lebih ramping dan efisien melalui proses evaluasi terhadap kelembagaan organisasi, perampingan (*down sizing*) dan penyederhanaan jenjang birokrasi.
Selain itu, diharapkan
- (ii) Adanya peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui pola rekrutmen dan penempatan dalam jabatan yang lebih terbuka (*open goverment*) dan berdayasaing (kompetitif) serta kebijakan yang berorientasi pada penguatan jabatan fungsional.

Perlu kami sampaikan bahwa saat ini dalam rangka peningkatan kapasitas SDM organisasi, kita dengan alat bantu teknologi informasi (*computer assisted test*),

sehingga proses rekrutmen CPNS telah dilaksanakan lebih cepat, mudah, murah, akuntabel dan transparan. Pertanyaan selanjutnya ialah Mengapa SDM yang harus kita dahulukan? Singkatnya adalah karena pelaku dan penyebab utama masih terdapatnya perilaku penyimpangan pelaksanaan tugas seperti adanya pungli, KKN, dll disebabkan oleh faktor SDM nya, bukan perangkat *hardware and software* nya.

Hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama, dan harus kita sepakati, bahwa korupsi adalah bahaya laten. Perbuatan korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, kita berkomitmen bahwa korupsi harus diperangi dan tidak boleh lagi terjadi karena korupsi akan menghancurkan bangsa ini. Untuk mendukung program pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, Kementerian Hukum dan HAM berusaha secara optimal melakukan perbaikan melalui sistem pengawasan internal.

Berbagai bentuk pelanggaran dan penyimpangan telah ditindaklanjuti secara cepat melalui pemberian sanksi yang tegas. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun bagi pegawai lainnya. Pemberian sanksi yang tegas disertai perbaikan dalam sistem pengawasan tentu diharapkan akan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan perilaku pegawai sehingga terbentuk sosok aparaturnya yang bersih dan berintegritas.

Pada saat yang sama, kita semua mengharapkan adanya perbaikan dalam sistem penggajian pegawai sehingga pendapatan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan minimal. Dengan demikian, tuntutan untuk bekerja dan berkinerja secara optimal mampu mengedepankan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Bapak dan Ibu yang saya banggakan,

Selanjutnya, dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin menyampaikan informasi tentang peran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dalam upaya memberikan kontribusi yang mendukung suksesnya pembangunan nasional khususnya di bidang hukum yaitu :

1. Menteri Hukum dan HAM, sesuai dengan pasal 1 PP No. 78 Tahun 2012 bertindak sebagai Koordinator Tim Bela Negara” dan sebagai Koordinator pelaksanaan MLA dan Ekstradisi pengembangan hukum Humaniter Internasional, peran ini harus diperkuat melalui pelaksanaan tugas dan fungsi bidang administrasi hukum umum;
2. Direktorat Jenderal Imigrasi “sebagai penjaga pintu gerbang kedaulatan RI” harus mewaspadaai adanya potensi Kerawanan Lalu Lintas Orang yang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia ;
3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengamanatkan terciptanya UPT Pemasyarakatan yang aman, tertib dan kondusif”.
Selanjutnya harus diwaspadai timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam skala besar maupun kecil dan kemungkinan terjadinya pelarian, pemberontakan, kerusuhan antar penghuni, peredaran narkoba, dan perkelahian/penganiayaan didalam Lapas dan Rutan;
4. Penguatan peran BPHN sebagai institusi penyelenggara bantuan hukum dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu juga diperlukan penguatan terhadap Pusat Penyuluhan Hukum sebagai pelaksana teknis kebijakan penyuluhan hukum di daerah dan desa-desa untuk menunjang pelaksanaan Pembangunan Hukum di Indonesia;
5. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berperan dalam perbaikan kualitas kepastian hukum melalui reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah. Sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk lebih meningkatkan kejelasan dan konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, perlu dilakukan penguatan terhadap implementasi Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, agar segera melakukan pengembangan Layanan Hak Kekayaan Intelektual yang bisa diakses masyarakat secara online dengan sistem aplikasi dan berbasis data yang akurat sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran. Perlu juga dilakukan

Penyederhanaan sistem dan perluasan layanan dari desa sampai ke kota dengan sistem jemput bola;

7. Dalam rangka memperteguh nilai KeBhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, dianggap perlu untuk menciptakan ruang dialog antar warga melalui peningkatan peran Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia untuk memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah terkait penanganan konflik sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM;
8. Selanjutnya terkait pelayanan publik yang menjadi domain Kementerian Hukum dan HAM harus terus kita evaluasi sehingga terjadi peningkatan mutu layanan yang berdampak positif secara langsung bagi seluruh masyarakat.
9. Yang tak kalah pentingnya, peran fasilitatif Kementerian Hukum dan HAM harus terus ditingkatkan untuk mendukung penuh program pemerintahan Presiden terpilih. Baik dari sisi perencanaan, penganggaran, kelembagaan dan pengelolaan SDM harus dilakukan secara tepat sasaran, implementatif, akuntabel dan bebas dari penyimpangan korupsi.

Hadirin yang saya muliakan,

Saya yakin, heterogenitas pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Hukum dan HAM merupakan kekuatan bukan merupakan hambatan. Atas hal ini, saya menghimbau agar kita menjadikan Kementerian Hukum dan HAM semakin kuat dan kokoh dengan memaknai nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu Jua. Pemahaman makna "*Unity in Diversity*" kiranya disinergikan melalui peringatan Hari Dharma Karyadika tahun ini untuk mengobarkan semangat kerja keras sebagai komitmen pelayanan kita kepada masyarakat, secara profesional dan berintegritas.

Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik dan memberikan dukungan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga beberapa capaian kinerja terbaik organisasi telah dicapai.

Kami sangat menyadari bahwa terdapat berbagai kendala dan keterbatasan, baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan tugas, melalui kesempatan ini, kami sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM. Kami mengharapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak, agar dimasa yang akan datang segenap jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI mampu melaksanakan amanat penugasan pemerintah khususnya dibidang pembangunan hukum secara optimal.

Pada akhirnya, dengan semangat Hari Dharma Karyadika Tahun 2014, marilah kita wujudkan visi dan misi Presiden terpilih dengan bekerja keras dan berprestasi secara sinergis dalam setiap pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM dengan penuh rasa tanggungjawab untuk Indonesia Hebat.

**DIRGAHAYU KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
JAYALAH SELAMANYA.**

Billahitaufiqwalhidayah,

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

TTD

YASONNA H. LAOLY